



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat Ke	:	15 (Lima Belas)
Tahun Sidang	:	2024-2025
Masa Persidangan	:	I
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia (Persero).
Hari, Tanggal	:	Senin, 2 Desember 2024
Pukul	:	10.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka.
Pimpinan Rapat	:	Dr. Hj. Anggia Erma Rini, M.K.M/ Ketua Komisi VI DPR RI.
Sekretaris Rapat	:	Dewi Pusporini, S.E., M.E., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	1. Perkenalan Mitra Kerja Komisi VI DPR RI; 2. Evaluasi Kinerja Korporasi Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2024 dan; 3. Penyampaian Rencana Kerja dan Roadmap Korporasi Tahun 2025.
Hadir	:	1. 20 Orang dari 46 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia (Persero), Bapak Rahmad Pribadi; Beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib yang tertuang dalam Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 276 ayat (1), maka Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia (Persero) pada Pukul 10.16 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Senin, 2 Desember 2024, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dibuka oleh Ketua Komisi VI DPR RI, Ibu Dr. Hj. Anggia Erma Rini, M.K.M

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan kinerja korporasi PT Pupuk Indonesia (Persero) sampai dengan triwulan III tahun 2024, rencana kerja dan *roadmap* korporasi tahun 2025.
2. Komisi VI DPR RI mendorong PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk:
 - a. mempertahankan harga dan kualitas produknya agar tetap kompetitif,
 - b. memastikan distribusi subsidi pupuk tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah dan efisien,
 - c. mensosialisasikan program “Makmur” untuk memberikan kemudahan petani mendapatkan pendampingan dan meningkatkan produktivitas tanamannya
 - d. dengan tetap mengedepankan prinsip *Good Corporate Governance* dalam rangka meningkatkan kinerja di tengah program ketahanan pangan pemerintah.
3. Komisi VI DPR RI mendorong pemerintah membuat kebijakan yang mendukung pengembangan industri PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan mempertahankan harga gas bumi tertentu (HGBT) dibawah \$6/MMBTU sehingga dapat mendukung upaya pemerintah dalam swasembada pangan nasional dan hilirisasi industri.
4. Komisi VI DPR RI mendorong pemerintah untuk:
 - a. melakukan persiapan terhadap kebijakan distribusi pupuk bersubsidi sesuai Perpres yang akan dikeluarkan oleh Presiden untuk memastikan rantai distribusi pupuk bersubsidi yang lebih pendek,
 - b. percepatan pembayaran hutang pemerintah kepada PT Pupuk Indonesia (Persero)
5. Komisi VI DPR RI meminta PT Pupuk Inonesia (Persero) untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja atas setiap pertanyaan yang diajukan oleh Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada Pukul 13.48 WIB.

**DIREKTUR UTAMA
PT. PUPUK INDONESIA (PERSERO)**

TTD.

RAHMAD PRIBADI

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

TTD.

**Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M
A-48**